

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris, basis pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya bergantung pada pola produksi pertanian, berkaitan dengan pertanian sering dikaitkan sistem penguasaan tanah. Sering menimbulkan konflik lembaga negara dengan masyarakat petani yang menuntut hak kepemilikan tanah, atau bahkan hanya sekedar mempertahankan sebidang lahan pertaniannya. Beberapa konflik agraria yang terjadi di Indonesia, mulai dari peristiwa Mesuji, Suku anak dalam di Jambi, Bima NTB, WTT Kulonprogo Yogyakarta, pegunungan kendeng Rembang Jawa Tengah, dan sederet panjang daftar gejolak konflik yang berawal dari bentuk komunikasi yang tidak terbangun dengan baik. Berdasarkan hal tersebut untuk Organisasi Tani HITAMBARA yang berperan dalam rangka mendapatkan hak-hak atas pemilikan serta pengelolaan tanah, sebagai sumber kehidupan masyarakat petani Desa Punggelan Kecamatan Punggealan Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengorganisir Petani dalam mendapatkan tanah.

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Keberhasilan proses redistribusi tanah yang terjadi di wilayah tersebut, tak lepas adanya suatu dorongan dari organisasi petani yang ada di wilayah tersebut, dengan melibatkan banyaknya lembaga atau organisasi, yang mendorong proses redistribusi tanah itu mampu menjadi sudut pandang tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Alur proses dilakukan

cukup panjang yaitu dengan melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur sertifikasi tanah, panitia redistribusi tanah dan organisasi perjuangan agraria ini ternyata membawa dampak yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam organisasi (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) yang kemudian dengan nama HITAMBARA yang memiliki keinginan tanah perkebunan Eks. PT. Pakisadji Banjumas yang statusnya terlantar ini di peruntukkan untuk mereka (petani penggarap). Proses redistribusi tanah yang memakan waktu tidak sebentar ini menuntut HITAMBARA selalu inten dalam menjalin komunikasi ke berbagai pihak, baik dari BPN Banjarnegara, BPN Kanwil Jawa Tengah, BPN Pusat, juga berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara juga Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Terkait dengan masalah tanah kelebihan yang ada di bekas Perkebunan PT. Pakisadji Banjumas ini adalah, dimana pada jaman Kolonial Belanda masyarakat sekitar yang memiliki tanah disekitar perkebunan ini diambil alih atau dirampas oleh Belanda karena masyarakat/kaum tani pada saat itu tidak mampu membayar pajak ke Belanda sehingga tanah-tanah milik kaum tani ini diambil oleh Kolonial Belanda. Selanjutnya paska kemerdekaan tanah yang dulu dirampas oleh Belanda tersebut dikuasai oleh Desa setempat yang diindikasikan Desa menjual tanah tersebut ke PT. Pakisadji Banjumas. Perkebunan PT. Pakisaji Banjumas tidak mencantumkan luas lahan yang dikuasai secara keseluruhan. Dilihat dari perjalanannya kisaran tahun 1965, saat itu Perkebunan PT. Pakisadji Banjumas yang dipimpin oleh Gondho

ternyata ini juga sering sekali memenjarakan kaum tani yang ada disekitar lahan tersebut karena mencari rumput di areal perkebunan yang dalam ingatan kami sedikitnya 10 petani yang pernah dipenjarakan oleh Perusahaan tersebut.¹

Melengkapi kisah konflik agraria di Indonesia adalah masyarakat Banjarnegara yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), sedang sungguh-sungguh melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah Perkebunan eks. HGU (Hak Guna Usaha) PT. Pakisadji Banjumas. Sampai saat ini juga petani penggarap melakukan pendudukan lahan dengan dasar karena HGU PT. Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya tahun 2011, Bupati Menolak rekomendasi perpanjangan HGU perusahaan dan tidak ada upaya perlawanan dari perusahaan, menurut PP 11/2010, tanah tersebut bisa didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.²

Lokasi bekas PT. Pakisadji Banjumas berada di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut data dari Dirjen Perkebunan tahun 2006, lokasi perkebunan dengan luas lahan mencapai 80,61 ha, namun petani penggarap dan para mantan pekerja bekas PT. Pakisadji Banjumas yang juga mengacu pada peta perkebunan yang terlampir, meyakini bahwa sebenarnya lahan yang dikuasai oleh bekas PT. Pakisadji tersebut lebih dari 80,61 ha melainkan sekitar 180 ha, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan ada tanah kelebihan dari perkebunan tersebut.³

¹ Laporan hasil Riset, *Op.Cit.* hal. 6

² Dokumen surat keberatan rekomendasi Bupati Banjar Negara untuk perpanjangan HGU. PT Pakisadji pada tahun 2010.

³ Laporan hasil Riset, *Op.Cit.* hal. 6

Lebih dari dua puluh (20) tahun yang lalu luasan lahan perkebunan bekas PT. Pakisadji Banjumas ini sebagian sudah diduduki oleh warga setempat, dengan jumlah petani penggarap yang saat ini mencapai 300 KK. Perkebunan yang awal komoditasnya perkebunan kopi dan sengon sekarang sudah berubah menjadi tanaman ketela pohon semua yang ditanam oleh petani penggarap yaitu warga setempat yang menduduki/ menempati lahan PT. Pakisaji Banjumas yang awalnya ada proses kesepakatan bagi masyarakat yang ingin menggarap lahan diperbolehkan dengan kesepakatan awal membayar sewa lahan sebesar 30-50 ribu sesuai dengan luas lahan yang digarap dan dengan menerapkan system bagi hasil dimana hasil komoditas lahan yang digarap oleh petani harus memberikan sebagian 50% dari hasilnya kepada perusahaan dengan alasan untuk membayar pajak, namun semenjak kontrak HGU-nya habis sistem tersebut tidak berlaku lagi.⁴

Pada saat perkebunan PT. Pakisadji banjumas dipimpin oleh Aloysius Robby Tatontos, tahun 1986 HGU mulai diperpanjang sampai tahun 2011, namun sekitar akhir tahun 1980-an, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.⁵ Kebangkrutan perusahaan disebabkan oleh terjadinya konflik keluarga yang saling memperebutkan atas pengelolaan perusahaan tersebut. Tepatnya tahun 1989 masyarakat mulai masuk ke lahan atau menggarap lahan karena perkebunan tersebut sudah berubah menjadi hutan dan menjadi sarang hama yang sangat mengganggu pertanian sekitar sehingga masyarakat mengusulkan pada pihak Kecamatan Punggelan agar menyelesaikan

⁴ Agus dalam Buletin Suara Tani, "Sejarah Kebon Kopi", Vol. 3, edisi 5, hal. 5

⁵ Harian Suara Merdeka, 2007

persoalan tersebut. Ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak PT. Pakisadji Banjumas untuk merombak lahan yang dahulunya memiliki ijin perkebunan kopi yang sudah berubah menjadi hutan rimba untuk dikelola masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian.⁶

Sampai saat ini masyarakat masih menggarap lahan tersebut dengan komoditas tanaman mayoritas ketela pohon, dan sedikit tanaman Albasia, jagung serta pisang. Mulai 15-6-2010 petani sudah melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar pada PT. Pakisadji Banjumas tersebut yang melibatkan Kepala Desa Punggelan, Masyarakat dan BPN Banjarnegara. Setelah itu pada bulan Oktober 2010, Bupati Banjarnegara Drs. Ir. Djasri, MM, MT. Berkeberatan untuk memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas dengan surat No. 525.3/3134.

Penolakan Bupati Banjarnegara tersebut disebabkan :

- 1). Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin b. melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
- 2). Lahan yang menjadi hak PT. Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin c. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait.

⁶ Koran Kedaulatan Rakyat. "Bekas Perkebunan Kopi PT. Pakisadji; Penggarap Tanah Tunggu Alih Status".

Tanggal 20/7/2013, hal. 2

Pada Akhir 2012 ada pertemuan di Balai Desa Punggelan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Tengah yang dihadiri oleh perwakilan para petani penggarap bekas PT. Pakisadji Banjumas. Pertemuan tersebut pihak Dinas kehutanan dan Perkebunan memberitahukan bahwa Ijin PT. Pakisadji Banjumas sudah habis dan warga boleh menggarap lahan namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut. Adapun harapan dan keinginan dari petani penggarap “bahwa mereka ingin tanah bekas PT.Pakisadji Banjumas tersebut bisa menjadi hak milik”.⁷

Sebagai bentuk keseriusan petani penggarap dalam mendapatkan tanah terlantar tersebut untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, maka ada kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekolah Bersama (SEKBER) mendorong mereka untuk membuat wadah organisasi perjuangan, yang bernama organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) yang terdiri dari 3 Desa yaitu Punggelan, Karang Sari dan Jembangan. HITAMBARA sudah pernah melakukan audiensi langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang, setelah sebelumnya juga pernah mendatangi BPN Banjarnegara, BPN RI di Jakarta. Hitambara juga melakukan audiensi dengan Bupati Banjarnegara. Tujuan audiensi tersebut kaitanya dengan status tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas yang sekarang seluruh lahan digarap oleh warga untuk dijadikan hak milik yang akan terus difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

⁷. Agus dalam Buletin Suara Tani, “Sejarah Kebon Kopi”, Vol. 3, edisi 5, hal. 6

Masyarakat penggarap secara keseluruhan menginginkan agar tanah Eks Perkebunan Kopi PT. Pakisadji Banjumas yang sudah diterlantarkan sejak akhir tahun 1980-an tersebut dapat diberikan kepada petani penggarap sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang ada.⁸

Upaya-upaya untuk merumuskan karangka pelaksanaan reforma agraria di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh kelompok-kelompok gerakan sosial yang memiliki konsentrasi terhadap isu reforma agraria di Indonesia. Upaya penerjemahan konsep reforma agraria hingga ke tatanan teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh beberapa akademisi dan aktivis yang menghasilkan dokumen petisi Cisarua pada tahun 2005. Dalam petisi Cisarua yang dirumuskan beberapa langkah kongkrit untuk menjalankan reforma agraria yaitu membentuk panitia *ad hoc*. Panitia ini juga menyiapkan dasar hukum bagi pembentukan suatu badan khusus yang bertugas menjalankan reforma agraria yang disebut dengan badan otoritas reforma agraria (BORA). Selain itu ada juga kelompok study pembaruan agraria (KSPA) yang pada Januari 2007 mengusulkan konsep reforma agraria kepada pemerintah, maka berpendapat bahwa tujuan dari reforma agraria adalah untuk: (1) Merombak struktur agraria yang timpang. (2) mengadakan pembangian yang adil atas sumber-sumber agraria, dalam hal ini yang utama adalah tanah, sebagai sumber penghidupan. (3) mengikis dan mencegah konsentrasi penguasaan tanah dan sumber daya alam. (4) menyelesaikan

⁸ Dokumen surat keberatan rekomendasi Bupati Banjar Negara untuk perpanjangan HGU. PT Pakisadji pada tahun 2010.

segala konflik agraria yang terjadi selama ini secara menyeluruh. (5) mengadakan sejumlah hal yang di perlukan bagi tumbuhnya ekonomi rakyat yang kuat, khususnya yang berbasis di pedesaan dan (6) Membangun fondasi yang kokoh atas keadilan sosial sejalan dengan amanah UUPA 1960 dan TAP MPR No.IX/2001.

Program redistribusi tanah yang dinamakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) kemudian dalam pidato presiden SBY pada 31 Januari 2007, dan kemudian juga disebut Rancangan Peraturan pemerintah tentang reforma agraria (RPP-RA) yang dimaksud untuk memayungi program tersebut. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang sepanjang 2007 melakukan advokasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang reforma agraria (RPP-RA), mempermasalahkan beberapa hal terutama tentang pengertian reforma agraria yang dalam RPP-RA didefinisikan sebagai sebuah proses yang berkesinambungan, dan bukan sebuah proses yang terbatas waktu.

Pelaksanaan PPAN ini pada distribusi tanah obyek land reform (TOL) pada subyek land reform. PPAN kemudian direncanakan mencakup dua komponen, pertama adalah redistribusi tanah untuk menjamin hak rakyat atas sumber-sumber agraria. Kedua adalah upaya pembangunan lebih luas yang melibatkan multi pihak agar menjamin aset tanah yang telah diberikan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar dalam arti luas (pendidikan, kesehatan, ekonomi dll) juga menyediakan dukungan modal, teknologi, manajemen, infrastruktur, pasar, dll. Komponen pertama yang berupa

redistribusi tanah kemudian disebut sebagai aset reform sedangkan bagian kedua disebut access reform. Gabungan dari kedua bagian tersebut kemudian disebut bagian land reform plus.⁹

Proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ini merupakan sebuah dinamika yang rumit karena melibatkan banyak pihak dan berlangsung dalam waktu panjang. Oleh karena itu, perlu dikuat kebijakan lokal dan membandingkannya dengan konsep pembaruan agraria yang mulai ditawarkan oleh pemerintah. Karena peran kelompok tani juga pada beberapa penjabaran di atas banyak disinggung sebagai salah satu faktor utama yang menjamin keberhasilan land reform dan salah satu pihak yang memimiliki peran dalam redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara ini adalah kelompok tani yang menamakan diri Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Peran Organisasi Tani Dalam Memperjuangkan Redistribusi Tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas di Kab.Banjarnegara (Studi kasus: Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara "HITAMBARA")".

⁹. Dianto Bachriadi, " Jalan Panjang Land Reform" Jakarta; Sains, 2012. hal :149-150.

B. Rumusan Masalah

1. Gerakan apa saja yang dilakukan organisasi Hitambara dalam memperjuangkan redistribusi tanah Eks, PT, Pakisadji di Kabupaten Banjarnegara.
2. Peran resolusi konflik apa saja yang dilakukan Organisasi Hitambara dalam memperjuangkan redistribusi tanah Eks. PT. Pakisadji Banjumas di Kabupaten Banjarnegara.

C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan penggalian gagasan mengenai upaya organisasi Hitambara dalam mendapatkan tanah atau redistribusi tanah yang terjadi di masyarakat kabupaten Banjarnegara khususnya yang berkaitan dengan masalah Agraria dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Menjadi salah satu bahan bacaan bagi siapa pun yang menaruh minat tentang bagaimana cara memperjuangkan redistribusi tanah yang terkait dengan kebijakan dan masalah agraria.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Menambah khasanah keilmuan bagi peneliti dalam menggali dan mengkaji mengenai pola komunikasi organisasi HITAMBARA dalam upaya redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pola komunikasi organisasi di internal organisasi HITAMBARA.

- c. Menambah perbendaharaan penelitian yang menggunakan metode analisis kualitatif pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Aspek praktis
 - a. Memberikan kontribusi yang positif terhadap organisasi HITAMBARA dalam memahami pola perjuangan organisasi dalam memperjuangkan tanah Eks PT. Pakisadji.
 - b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat pengarang di daerah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Punggelan, provinsi Jawa Tengah.

E. Studi Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada beberapa skripsi yang pernah membahas seputar redistribusi tanah. Adapun skripsi-skripsi yang pernah membahas seputar redistribusi tanah di antaranya:

Tabel I.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Universitas	Judul penelitian	Topik yang di bahas
1	Nurhayati	Universitas Diponegoro Program Pascasarjana	Pelaksanaan Redistribusi Tanag Objek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Tahun 2006	Pelaksaaan redtribusi tanah
2	Ulfia Hasana	Universitas Riau Jurusan Ilmu Hukum	Redistribusi Tanah Terlantar di Provinsi Riau Tahun 2015	Pendistribusian tanah terlantar
3	Shinta Pratiwi	Universitas Lampung Jurusan Hukum Administrasi Negara	Pelaksanaan Penegasan dan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Kota Agung Timur Kab. Tanggamus. Lampung tahun 2011	Pemastian hukum tanah terlantar dan mendistribusikan nya

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penulis ajukan tidak sama dengan ketiga skripsi di atas. Pada skripsi ini penulis meneliti Peran organisasi HITAMBARA dalam proses redistribusi Tanah HGU.PT. Pakisadji Banjumas di banjarnegara, dan masyarakat sekitar di ruang lingkup organisasi HITAMBARA dalam redistribusi tanah perkebunan bekas PT. Pakisadji, selain itu perbedaanya terletak pada tempat penelitian, pada

skripsi ini penulis meneliti organisasi HITAMBARA yang berbeda dengan tempat-tempat penelitian skripsi di atas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Gerakan Sosial

Berbicara tentang gerakan sosial (social movement) maka tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kapitalisme dunia, karena pada umumnya gerakan sosial lahir untuk merespon akan diskursus kapitalisme. Walaupun gerakan sosial termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi dilingkungan yang suda modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan sosial bukan hal yang aneh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gerakan sosial ialah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditunjukkan pada suatu perubahan sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola lembaga yang ada.¹⁰ Desakan untuk melakukan perubahan dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial muncul dari situasi yang dihadapi masyarakat karena ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Gerakan sosial juga lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak dikehendak masyarakat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai kurang adil. Berbagai macam gerakan sosial dalam bentuk Ormas, LSM dan Parpol yang kemudian menyebar memberikan indikasi

¹⁰ [http://globalisasi.wordpress.com/2006/7/10/gerakan sosial: Kajian Teoritis](http://globalisasi.wordpress.com/2006/7/10/gerakan-sosial:Kajian-Teoritis), Hal. 3-4 (dalam jurnal,aktivimegemkara-bp3kb dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara, Novi Andrianthy,2009)

bahwa dalam suana demokratis, masyarakat banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang rusak.

Gerakan sosial secara teoritis merupakan gerakan yang lahir dari atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun dipemerintah akan menjadi sorotannya. Dari literatur definisi tentang gerakan sosial, ada juga yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga muncul dari hasil rekayasa para pejabat pemerintah.¹¹

Anthony Gidden menyatakan Gerakan Sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (action collective) diluar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan.¹² Sedangkan Mansoer Fakhri menyatakan bahwa Gerakan Sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka mewujudkan sosial terutama dalam usaha struktur maupun sosial.¹³

¹¹ Juwono Sudarsono (ed), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta:Gramedia, 1976, Hal.24-25. (dalam jurnal,aktivime gemkara-bp3kb dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara, Novi Andrianty, 2009)

¹² Fadhilah Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Malang : PlaCID's dan Averroes Pree, 2006, Hal. 1(dalam jurnal,aktivime gemkara-bp3kb dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara, Novi Andrianty, 2009)

¹³ Mansoer Fakhri, *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan dampak Gerakan,*

Sejalan dengan pengertian Gerakan Sosial di atas , Herbert Blumer merumuskan Gerakan Sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas tujuan dan gagasan. Robert Misel dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial mendefinisikan Gerakan Sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga dan dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.¹⁴

Tetapi, David Meyer dan Sidney Tarrow, dalam karya mereka *social Movement Society* (1998). Memasukan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah definisi yang lebih inklusif tentang Gerakan sosial, yakni: tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, sanggan atau musuh, dan pemegang otoritas.¹⁵ Ada dua definisi yang sangat menonjol didalam teori Gerakan sosian yang dibahas di atas. Pertama, gerakan-gerakan sosial melibatkan “tantangan kolektif”, yakni upaya-upaya terorganisir untuk mengadakan perubahan di dalam arasemn-araseman kelembagaan. Tantangan-tantangan ini bisa berpusat kepada kebijakan-kebijakan publik atau ditunjukan untuk mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga-lembaga sosial politik, distribusi jaminan sosial, atau bisa juga menyangkut konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial

Yogyakarta : Insist Press, 2002, Hal. Xxvii (dalam jurnal,aktivime gemkara-bp3kb dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara, Novi Andrianthy, 2009.

¹⁴ Robert Misel, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta : Resist Book, 2004, hal. 6-7

¹⁵ David Meyer dan Sidney Tarrow. *The Sosial Movement Society*. 1998. (dalam jurnal,aktivime gemkara-bp3kb dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara, Novi Andrianthy, 2009)

dan politik. Kedua ialah corak politik yang inheren di dalam gerakan-gerakan sosial. Ini terutama terkait dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya lewat Gerakan-gerakan sosial, yang secara tipikal mencangkup perubahan di dalam distribusi kekuasaan dan wewenang. Tujuan-tujuan politis ini hanya mungkin tercapai lewat interaksi-interaksi yang terus-menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik di luar Gerakan, yang terpenting di antaranya adalah sekutu-sekutu dan pesaing-pesaing politik pemegang otoritas kekuasaan.¹⁶

Dany JA menyatakan ada tiga kondisi yang lahirnya Gerakan Sosial, pertama, Gerakan sosial dilahirkan dengan kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Contoh Pemerintah yang moderat, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan Sosial ketimbang Pemerintah yang otoriter. Kedua, Gerakan Sosial muncul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat Tradisional ke masyarakat modern, akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin meluas antara si kaya dan si miskin. Perubahan ini juga dapat menyebabkan kritis identitas dan lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini di agungkan. Perubahan itu akan menimbulkan gejolak yang dirugikan dan kemudian meluas menjadi Gerakan sosial. Ketiga, Gerakan sosial semata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Sang tokoh penggerak akan menjadi

¹⁶ <http://maulananusantara.wordpress.com/2008/04/18/sintesis-saling-menguntungkan-hilangnya-orang-luar-dan-orang-dalam/hal.1> (dalam jurnal, *aktivime gemkara-bp3kb dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara*, Novi Andrianthy, 2009)

inspirator, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi untuk terlibat dalam gerakan tersebut.¹⁷

Meskipun Gerakan sosial merupakan gejala yang baru dalam ilmu sosial, namun gerakan sosial sudah ada sejak lama yaitu mulai abad ke 18 yaitu pada saat Gereja Methodist di Amerika dan Inggris menjadi sebuah bentuk gerakan sosial yang berbasis Agama. Di abad 19 terdapat gerakan sosial internasional (The International Socialist Movement) yang tumbuh dan berkembang di berbagai tempat di Eropa juga dianggap sebagai gerakan sosial. Dan pada abad ke 20 juga terdapat gerakan hak-hak sipil di Eropa dan Amerika yang menentukan sejarah panjang diskriminasi rasial di negeri tersebut.

Di tahun 1970an gerakan anti perang dan anti gerakan anti kemapanan yang mengguncang kehidupan Amerika juga dianggap sebagai inspirasi dari gerakan social. Bagi Indonesia sendiri fenomena gerakan sosial bukanlah hal yang baru karena banyak terdapat model-model aksi sosial sebagai respon terhadap kebijakan publik yang tidak berpihak. Misalnya aksi menentang penggusuran tanah di Kedung Ombo, penolakan proyek tambang pasir besi di Kulon Progo yang mengancam perampasan tanah dan sebagainya. Sehingga jika melihat beberapa kasus gerakan sosial di Indonesia maka dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam rangka menuntut perubahan dan institusi, kebijakan atau juga struktur pemerintah. Dan biasanya gejala gerakan sosial lahir karena

¹⁷ Noer Fauzi, *Memahami Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Insist Press, 2005, Hal.21

kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.

Sebagai contoh gerakan kolektif dari sebuah gerakan sosial yang terorganisir dapat terlihat pada masyarakat di kab. banjarnegara kec. Punggelan, Karang Sari, Jambangan Jawa Tengah. Mereka membentuk sebuah organisasi perjuangan yang bersifat independen dengan nama organisasi tani HITAMBARA. Organisasi tani HITAMBARA bertujuan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat lokal dan petani penggarap dalam rangka memperjuangkan hak ekonomi, politik, sosial budaya demi kelangsungan hidup mereka. Hal itu dapat tercermin dalam aktivitas-aktivitas perjuangan seperti pemetahan, advokasi, audiensi dan sosialisasi mereka selalu terorganisir dengan baik.

2. Teori konflik

a. Pengertian konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *configere, conflictus* yang berarti saling memukul atau pertentangan.¹⁸ Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, konflik di artikan sebagai perwujudan dan atau palaksana beraneka pertentangan antara kedua belah pihak yang dapat merupakan kedua orang bahkan golongan besar seperti negara.¹⁹ Menurut Surbakti, konflik memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat,

¹⁸ Wirawan, 2010:4. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta, Salemba Humanika.

¹⁹ (Yayasan Cipta Loka, 1984: 63).

persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan antara individu dan kelompok dan pemerintah.²⁰

Sementara menurut A.M Harjana, konflik adalah perselisihan, pertentangan, percecokan merupakan pengalaman hidup yang paling mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antar dua orang atau dua kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.²¹

Istilah konflik menurut Webster dalam bahasa aslinya *conflict* berarti suatu perkelahian, pertentangan dan perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainnya. Dengan kata lain istilah tersebut sering juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Webster juga mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.²²

Selain itu, Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan

²⁰ Surbakti dalam Ginting, 2005:7. Ramlan Surbakti, (2007). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Grasindo.

²¹ Harjana, A.M, 1994:9. *Konflik di Tempat Kerja*, Yogyakarta, Kanisius.

²² Muryanti, dkk, 2013: 7-8. *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Yogyakarta, Kreasi Wacana & Laboratorium Sosiologi UIN Sunan Kalijaga.

tindakan orang, yang membentuk inti dan sikap, tujuan, dan niatnya.²³

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan dan perselisihan antara kedua pihak karena adanya unsur kepentingan dan saling mempetahankan nilai, adat, dan pandangan ataupun ideologi agar tercapai tujuan yang diinginkan.

b. Sebab Terjadinya konflik

Menurut Paul Con, konflik disebabkan ada dua hal: *pertama*, kemajemukan horizontal yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. *Kedua*, kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.²⁴

Selanjutnya menurut Pigay dan Natalis, bahwa konflik itu bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian atau kekerasan sebab masing-masing

²³ Pruitt, G, Dean, Rubin, Z, Jeffrey, 2011: 21. *Teori konflik sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

²⁴ Con, Paul, 1971: 30. *Making Conflict and Decision: an introduction to Political Science*, New York, Harper & Row Publisher.

pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang di inginkan.²⁵

Robert Gurr mengemukakan bahwa konflik diawali dengan ketidakpuasan, diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Salah satu ada keinginan relatif muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan.²⁶ Selanjutnya Soetrino menyebutkan bahwa secara garis besar penyebab terjadi konflik. *Pertama*, masalah hubungan negara dan masyarakat yang belum memiliki format yang jelas. Negara masih mendominasi semua aspek kehidupan masyarakat, sementara masyarakat merasa tidak berdaya menghadapinya. *Kedua*, mengurangnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Pelayanan publik yang jelek, ketidakpekaan birokrasi terhadap aspirasi masyarakat akibat kebijakan pembangunan yang bersifat uniform. *Ketiga*, lajunya penetrasi kapital di wilayah pedesaan sehingga masyarakat kehilangan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan mereka.²⁷

Selain itu, menurut Riwukaho, bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan atau kepentingan masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan pertentangan di antara anggota maupun kelompok masyarakat yang sering menjadi pangkal terjadinya konflik.²⁸ Dengan

²⁵ Pigay dan Natalis, 2001: 71.

²⁶ Gurr, Robert, 1971: 24. *Why Men Rebel*, Princeton University Press.

²⁷ Soetrino, Lukman, 2003:38. *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia*, Yogyakarta, Tajidu Press.

²⁸ Riwukaho, Josef, & Haryanto, 1997:3. *Fungsi-fungsi Pemerintah, Materi Pendalaman bidang Tugas DPRD I dan II*, Jakarta, Badan Diklat Depdagri.

memperhatikan dari beberapa penyebab konflik di atas dapat di peroleh gambaran umum bahwa konflik dapat tercetus di permukaan apabila terjadi benturan kepentingan dari pihak-pihak yang di perlakukan secara tidak adil. Ketidakadilan ini bisa menyangkut distribusi sumber-sumber kuasa atau kekuasaan yang tidak merata.

c. Konflik Agraria (Konflik Atas Tanah)

Konflik agraria sebagaimana dinyatakan oleh Christodoulou, “*Agrarian Reform is the offspring of agrarian conflict*” (Christodoulou dalam Wiradi, 2000: 84). Reforma agraria adalah anak kandung konflik agraria. Artinya, lahir dari gagasan tentang perombakan struktur pemilikan/penguasaan tanah (yang kemudian dikenal dengan istilah “*landreform*”. berkembang menjadi “*agrarian reform*”, dan sekarang “reforma agraria”) merupakan respon terhadap situasi konflik dalam masalah pertanahan. Karena itu, untuk memahami seluk beluk reforma agraria, perlu juga dipahami dulu masalah konflik agraria.²⁹

Sebagai suatu gejala sosial, konflik agraria adalah suatu situasi proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, minyak bumi dan juga udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling “berlomba” untuk mendahului mencapai objek itu, sifatnya masih dalam batas “persaingan”. Tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan terjadilah situasi konflik. Jadi konflik adalah

²⁹ Wiradi, Gunawan, 2000: 84-85. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogyakarta, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar.

bentuk ekstrim dan keras dari persaingan.³⁰ Menurut Wiradi, kunci untuk memahami konflik agraria adalah kesadaran kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan. Bukan saja sekedar sebagai aset, tapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. Ketimpangan dalam hal akses terhadap tuan tanah akan sangat menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika tertentu hubungan antar lapisan masyarakat tersebut.³¹ Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities*.³² Menurut Wiradi, di Indonesia terdapat setidaknya tiga *incompatibilities*, diantaranya:

- a. Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan tanah”.
- b. Ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah, dan
- c. *Incompatibility* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.³³

Ketimpangan yang pertama sudah dapat kita pahami. Dari hasil sensus pertanian 1993 misalnya, dapat ditarik suatu gambaran kasar bahwa, disatu pihak sebanyak 43% dari jumlah rumah tangga pedesaan merupakan Tuna Kisma (Landless). Dilain pihak 16% rumah tangga menguasai 69%

³⁰ Hoult dalam Wiradi, 2000: 85. *Catatan Ringkas: Konflik Agraria Topik Relevan Untuk Diteliti*, Jakarta, Makalah Pelatihan Sejarah yang Diselenggarakan oleh LIPI-NIOD tanggal 17 oktober 2003.

³¹ Wiradi, 2000: 86. *Metodologi Penelitian Agraria*, Bogor, Sajogyo

³² Christodoulou dalam Wiradi, 2000: 86. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogyakarta, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar.

³³ Wiradi, 2000: 87. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogyakarta, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar.

luas tanah yang tersedia dan 41% rumah tangga menguasai hanya 31% luas tanah yang tersedia.³⁴

Mengenai peruntukan agak sulit untuk diperoleh data yang bisa dipercaya. Bukan saja karena masalah peruntukan itu tampaknya memang belum sempat diatur secara memadai, tetapi juga karena hal ini berkaitan erat dengan masalah penggunaan tanah, dimana perubahan fungsi tanah berkembang dengan cepat. Namun indikasi kesenjangan itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa sementara tanah-tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian masyarakat selalu digusur, tanah-tanah perkebunan besar bertambah luas. inilah salah satu sumber konflik.³⁵

d. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. (Miall, 2002). sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.³⁶

³⁴ Suhendar dan Wiradi dalam Wiradi, 2000: 87. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogtakarta, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar.

³⁵ Wiradi, 2000: 87. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogtakarta, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar.

³⁶ Miall, Hugh, dkk, 2002: 31. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, sosial, Agama, dan Ras*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Resolusi konflik merujuk pada penyelesaian konflik nyata dengan perubahan sikap, pandangan, tingkah laku dan juga tujuan akhir dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk membuat orang yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses perdamaian. Hal ini agar mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya mereka terima.³⁷

Meski demikian resolusi konflik selalu kontroversial. Pada satu sisi kelompok realisme melihat pemecahan konflik sebagai suatu yang lemah dan tidak realistis. Di sisi lain kelompok Neo Marxism dan pemikir-pemikir radikal melihat usaha untuk resolusi konflik suatu pandangan yang keliru, karena mendamaikan benturan kepentingan yang berbeda. Namun lepas dari perdebatan tersebut di atas bahwa tujuan dari resolusi konflik dapat dilihat secara positif.

³⁷ Askandar, Kamarulman, 2002: 10. *Pengelolaan Konflik: Suatu Pandangan Umum*, Yogyakarta, PSKP UGM.

G. Definisi Konseptual

Berdasarkan landasan teori diatas, maka penulis dapat merumuskan definisi konsep sebagai berikut:

1. Teori Gerakan Sosial adalah diartikan sebagai tantangan-tantangan pada pemegang kekuasaan atas nama orang-orang tertindas/tersingkirkan yang hidup dibawah kawasan atau pengaruh pemegang kuasa itu. Gerakan sosial juga didefinisikan Tarrow (1994) sebagai tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, lawan dan penguasa.
2. Peran resolusi konflik Organisasi Hitambara adalah kemampuan Organisasi Hitambara dalam melaksanakan penyelesaian konflik Redistribusi Tanah.

H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Sebgai berikut :

1. Gerakan Organisasi HITAMBARA
 - a. Melakukan pendudukan lahan.
 - b. Membangun Organisasi Petani pengarap yang kuat.
 - c. Membangun solidaritas dengan Organisasi lainnya
2. Peran resolusi konflik yang dilakukan Organisasi Hitambara dalam Redistribusi tanah.
 - a. Kordinasi dengan BPN Kab.Banjarnegara
 - b. Kordinasi dengan BPN Kanwil Jawa Tengah

c. Kordinasi dengan BPN RI

d. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan kajian analitis terhadap peran organisasi HITAMBARA. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Creswell (1998) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological tradition of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses word, report detailed view of informant, and conducts the study anatural setting. (Creswell, Qualitative Inquiry” dalam www.personal.psu.edu/wxh139/Quality.htm)”

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, seperti untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.³⁸ Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, artinya metode deskriptif untuk mendeskriptifkan keberadaan makna yang tersirat dalam penelitian yang akan dianalisis sehingga menjabarkan bagaimana peran organisasi HITAMBARA tersebut dalam upaya redistribusi tanah di Banjarnegara. Indikasi awal penulis dari beberapa data yang ada, muncul dengan dugaan bahwa masyarakat yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA ingin memiliki tanah perkebunan bekas PT Pakisadji Banjumas yang notabene tanah tersebut telah habis hak guna usahanya. Jalan yang di tempuh baik dengan jalan Parlementariat ataupun Extra Parlementariat. Berlandaskan itulah, jenis penelitian ini lebih mudah menggunakan metode berfikir deskriptif untuk menganalisis kebenarannya.

2. Unit Nalisis

a. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus organisasi HITAMBARA dan mantan mandor perkebunan bekas PT. Pakisadji banjumas Kecamatan Punggelan Banjarnegara yang lebih berkompeten dalam mengaplikasikan peran organisasi HITAMBARA tersebut dalam upaya Redistribusi Tanah.

b. Obyek Penelitian

Adalah suatu istilah untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penulisan ini

³⁸ Meleong, 2010, hal. 3

yang menjadi obyek penelitian adalah tentang Peran Organisasi Tani Dalam Memperjuangkan Redistribusi Tanah Eks. HGU PT. Paskisadji Banjumas, kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

3. Lingkup penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Alasan pemilihan lokasi ini karena peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja yang dilakukan organisasi hitambara dalam proses memperjuangkan redistribusi tanah eks. PT. Pakisadji Banjumas di Banjarnegara untuk menyelesaikan redistribusi tanah tersebut.

4. Data dan sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data di lapangan. Data primer misalnya adalah data mengenai petani penggarap di desa punggelan kabupaten Banjar Negara, maka data yang didapat adalah data yang langsung bersumber dari masyarakat yang terdampak

Tabel I.2
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Perjuangan Organisasi “HITAMBARA” dan petani penggarap untuk mendapatkan hak milik tanah eks. PT. Pakisadji Banjumas. Respon/sikap terkait perjuangan masyarakat atas tanah di Kecamatan Punggelan	a). Ketua Organisasi Tani, Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara “HITAMBARA” (Sarkim) b). Anggota Organisasi Tani “HITAMBARA” (Siren. dkk) c). Petani Pengarap Desa Punggelan, Dusun Jebuk (Kisanto)	Wawancara mendalam
Sejarah asal-usul dan komoditas serta kondisi perkebunan saat ini.	a). Mantan Karyawan PT. Pakisadji Banjumas (Tuslim) b).Beberapa petani penggarap lainnya.	Wawancara Mendalam
Sejarah asal-usul Organisasi HITAMBARA	a.) Ketua Organisasi HITAMBARA (Bapak Sarkim)	Wawancara santai tapi sopan dan mendalam

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung.³⁹ Data yang di dapat melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian. Diperoleh dari literature-literatur, dokumen-dokumen, penelitian perorangan terdahulu yang relevan

³⁹ Moleong,2014.

dengan objek penelitian.⁴⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel.I.3
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Usulan penyelesaian konflik tanah eks. PT. Pakisadji Banjumas.	Organisasi Petani Penggarap, HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)
Peta Lokasi Perkebunan Eks. PT. Pakisadji Banjumas.	Mantan Karyawan PT. Pakisadji Banjumas
Pemberitaan terkait bekas perkebunan PT. Pakisadji di surat kabar <i>“Kedaulatan Rakyat”</i> .	Forum Sekolah Bersama (SEKBER)
Daftar isian identifikasi dan penelitian tanah terlantar. Hak Atas Tanah (HAT)/ Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT)	Kepala Desa Punggelan Era Pemerintahan “Sartiyah”

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan obyek penelitian maka disini penulis menggunakan metode antara lain.

a. Wawancara

Sebagai suatu proses tanya jawab lisan secara berhadapan secara fisik dalam artian melihat dan mendengar dengan telinga sendiri.⁴¹ Wawancara disini di tunjukkan pada orang-orang yang berkompeten, agar tidak menyimpang dari persoalan penelitian maka digunakan interview bebas terpimpin, interviweer membawa kerangka pertanyaan (*frame work of question*) untuk di

⁴⁰ Moleong,2014.

⁴¹ Soetrino, Lukman. *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia*, yogyakarta, Tajidu Press. 2003, hal: 192

sajikan, dengan tujuan sistematika pertanyaan yang diinginkan, dalam kerangka pertanyaan itu interviweer mempunyai kebebasan untuk menggali alasan-alasan dan dorongan-dorongan dengan pembicaraan yang tidak kaku, dengan begitu interviweer dengan leluasa meminta keterangan tentang keobyektifikan sesuatu yang di teliti.

Adapun yang menjadi informan peneliti iyalah:

- 1) Bapak Sarkim yang menjabat sebagai ketua organisasi HITAMBARA.
- 2) Bapak Tuslim yang menjabat sekertaris di organisasi HITAMBARA.
- 3) Bapak Hartoyo sebagai mantan mandor perkebunan PT Pakisadji Banjumas dan juga anggota organisasi HITAMBARA.
- 4) Mas Kisam sebagai petani penggarap perkebunan bekas PT Pakisadji Banjumas dan juga anggota organisasi HITAMBARA.
- 5) Bapak Ahmad sebagai warga penduduk pribumi asli yang tempat tinggalnya berdekatan dengan perkebunan bekas PT Pakisadji dan juga anggota organisasi HITAMBARA.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap peran-peran subyek yang di teliti baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya

maupun situasi buatan yang khusus diadakan.⁴² Maka dalam teknik pengumpulan data melalui observasi ini peneliti memfokuskan beberapa arahnya dalam pengumpulan data lain ;

- 1) menyesuaikan dengan tujuan penelitian
- 2) merencanakan secara sistematis
- 3) mengontrol secara rehabilitas dan validitas data yang diperoleh

6. Teknik Analisa Data

Dalam analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (1984). Menurut Miles dan Huberman ada 3 jenis kegiatan dalam analisis data antara lain:⁴³

- a. Reduksi data. Reduksi bukan sesuatu yang terpisah dari analisis. Peneliti menganalisis data dengan mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir.
- b. Penyajian data. Dalam penyajian data atau data display ini peneliti mendefinisikan model sebagai suatu kesimpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini teks naratif.
- c. Pengujian kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu,

⁴² Surahmad, 1994 : 162

⁴³ Pawito, 2007:104

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposi-proposisi.

7. Fokus Penelitian

Menurut Moloeng (2000). Fokus penelitian ditentukan dengan tujuan.

- a. Membatasi studi, berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat, penelitian menjadi layak.
- b. Secara efektif untuk menyaring informasi yang mengalir masuk, jika data tidak relevan maka data tersebut dapat dihiraukan.

Untuk membatasi analisa dalam penelitian ini, yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis memfokuskan penelitian pada peran organisasi hitambara dalam memperjuangkan redistribusi tanah eks PT. Pakisadji Banjumas di Kabupaten Banjarnegara yang tentunya berdasarkan Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan dengan menyesuaikan kondisi material yang ada di masyarakat. Dengan demikian, maka penelitian ini memfokuskan diri pada analisis bagaimana organisasi “HITAMBARA” Kabupaten Banjarnegara dalam menyelesaikan redistribusi tanah dan kendala-kendala dalam masalah agraria. Untuk mengukur peran organisasi “HITAMBARA” terhadap program landreform yang salah satunya redistribusi tanah, yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

J. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, kebasahan data, Teknik Analisa Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Umum dan Deskripsi Wilayah. Pada Bab ini terdiri dari: Gambaran umum organisasi Hitamabara, sejarah Hitamabara, Sejarah Perkebunan PT. Pakisadji Banjumas, Batas, Letak Wilayah dan Jumlah Penduduk Banjarnegara, Kondisi Fisik Wilayah dan Letak Wilayah Tiga Desa di Kecamatan Punggelan.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan dibahas peran organisasi Hitamabara, hubungan organisasi Hitamabara terkait kepentingan atas redistribusi tanah, peran organisasi Hitamabara dan pemerintah dalam penyelesaian redistribusi tanah.

Bab IV, Penutup. Pada Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini akan dikemukakan saran dan rekomendasi kepada Organisasi Hitamabar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.